



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA – PD)
KECAMATAN COMAL
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL**

PERATURAN CAMAT COMAL KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/33/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

CAMAT COMAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 maka Kecamatan Comal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Camat Comal tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pematang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Comal Kabupaten
Pematang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pada
Perangkat Daerah Kecamatan Comal yang memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Comal Kabupaten
Pematang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut
:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Camat Comal Kabupaten Pematang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Comal

pada tanggal, 19 Agustus 2021

CAMAT COMAL,



FAUZAN, S.Sos., M.Si

Pembina

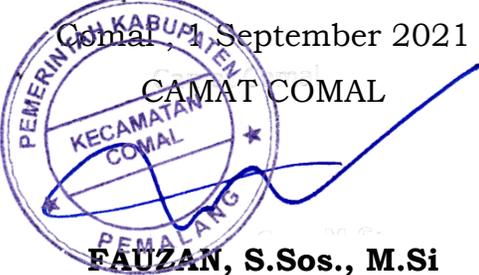
NIP. 19720420 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Comal Tahun 2021 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 dibuat sesuai Surat Edaran Bupati Pematang Nomor: 050/984/Bappeda tanggal 6 April 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026, Surat Bupati Pematang Nomor: 005/1016/Bappeda tanggal 2021 perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah , Surat Bupati Pematang Nomor: 005/2230/Bappeda, tanggal 27 Agustus 2021 perihal Sinkronisasi Penyusunan dan Penyesuaian Dokumen Perencanaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang, Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang dan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang.

Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih dijumpai beberapa kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renstra dimasa yang akan datang. Namun demikian kami berharap Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Comal, 1 September 2021
CAMAT COMAL

FAUZAN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19720420 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	4
1.3.Maksud dan Tujuan.....	8
1.4.Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN COMAL.....	10
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Comal	
2.2.Sumber Daya Kecamatan Comal.....	21
2.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal.....	28
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Comal	37
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN COMAL	
3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Comal.....	39
3.2.Telaahan Visi dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.....	43
3.3.Telaahan Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kabupaten.....	48
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	61
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	99
BAB VIII. PENUTUP.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2,1. Pegawai Kecamatan Comal
- Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan
- Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon
- Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2019-2020
- Tabel 2.6. Inventaris Ast Kecamatan Comal
- Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Comal
- Tabel 2.8.a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang
- Tabel 2.8.b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Tahun 2020 sesuai Bab II RPJMD Tahun 2021-2026
- Tabel 2.8.c. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan SDGs, Indikator pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Indikator pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
- Tabel 2.8.d. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
- Tabel 2.8.e. Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021
- Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan
Comal

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026
- Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Comal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Comal sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Comal sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Comal disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Comal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

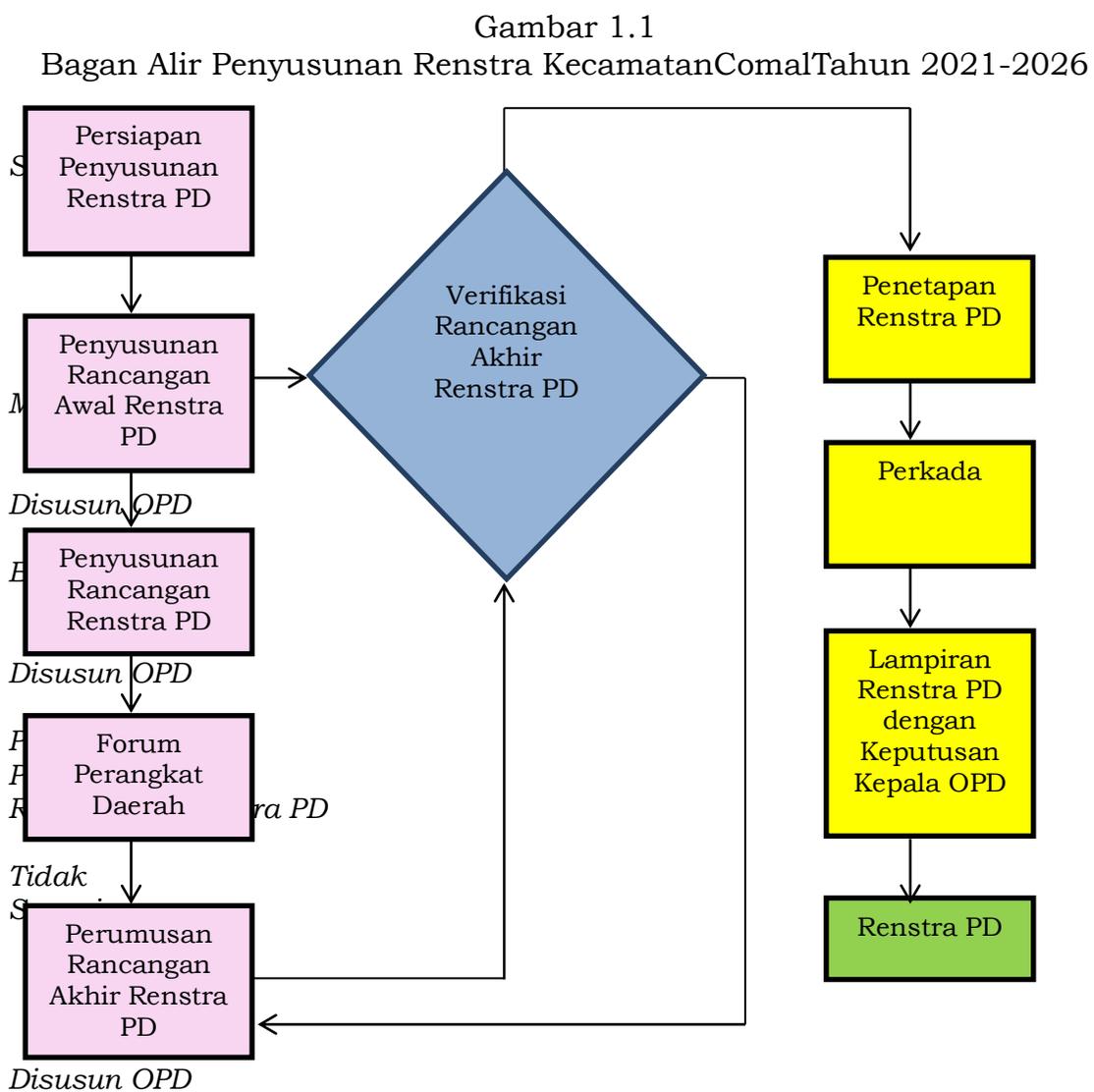
Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Comal serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Comal selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan

memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Comal, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Comal harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :

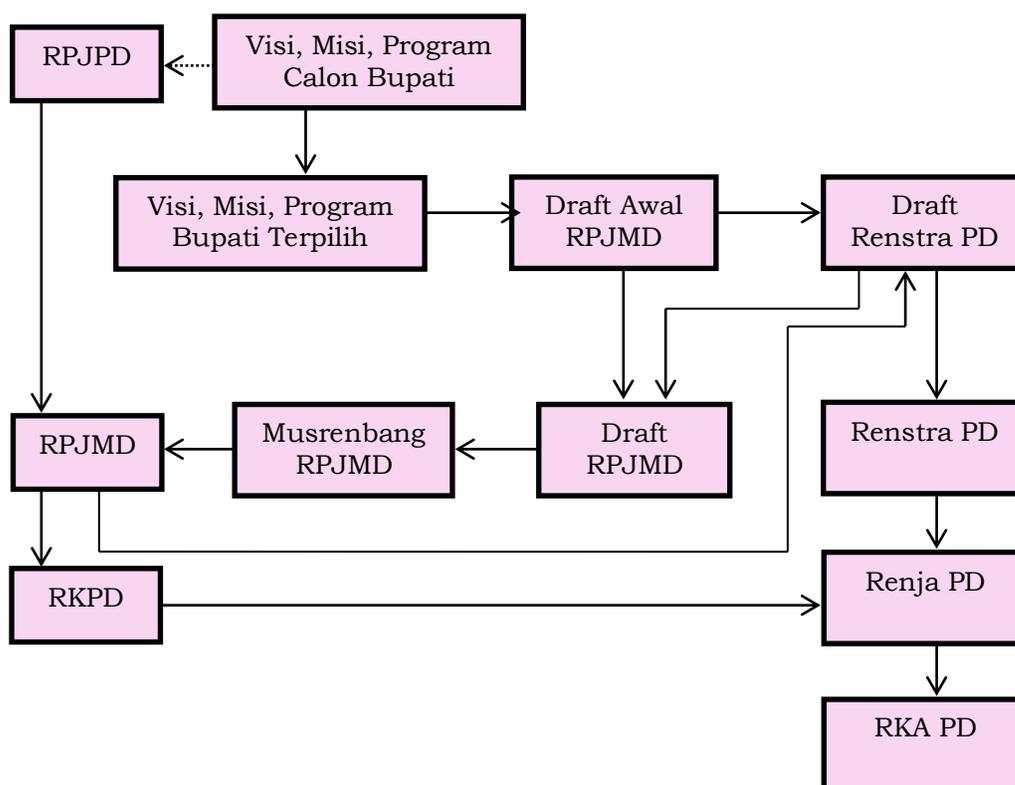


Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam

Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Comal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;

2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Comal serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Comal.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Comal Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Comal, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Comal, sumber daya Kecamatan Comal, kinerja pelayanan Kecamatan Comal, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Comal.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Comal, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Comal, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Comal.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Comal dalam 5 (lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Kecamatan Comal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Comal.

BAB II

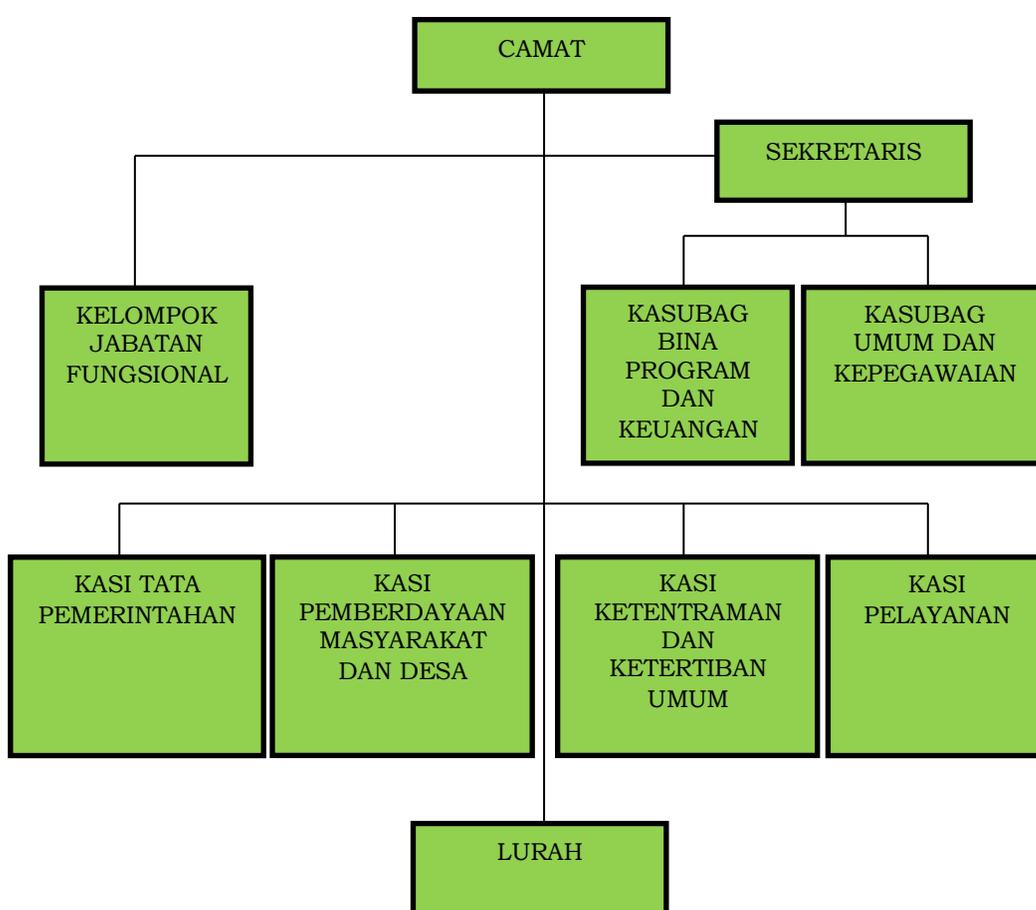
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN COMAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Comal

Kecamatan Comal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Comal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Comal



Sumber : Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
 1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai

- bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
 6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
 7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
 10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat

kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan

- ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
 9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- F. Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Comal

Sumber daya Kecamatan Comal sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Comal dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Kecamatan Comal

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1					1	1
2	Sekcam	1					1	1
3	Kasubag	1				1		1
4	Kasi Kecamatan	3	1			4		4
5	JFU Kecamatan	8	7		5	10		15
6	JFT Kecamatan							
7	Non ASN Kecamatan	7	3	10				10
8	Lurah		1			1		1
9	Seklur	1				1		1
10	Kasi Kelurahan	3				3		3
11	JFU Kelurahan	3	1	1	1	2		4
12	Non ASN Kelurahan	5	1	1				6
Jumlah		33	14	12	6	22	2	47

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2021

Pegawai Kecamatan Comal berjumlah 47 orang, meliputi 33 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Comal dominan laki-laki yaitu sebanyak 70,21 %. Agar kecamatan Comal menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I sebanyak 12 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 22 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Comal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 46,80 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	
2	Diklatpim IV	10	8	2
3	ADUM			
4	SEPADA			
5	Struktural yang belum diklat	1	1	
Jumlah		12	10	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal., 2021

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Comal, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 10 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 1 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	
2	Sarjana (S1)	13	6	7
3	Diploma	2	1	1
4	SLTA	27	21	6
5	SLTP	1	1	
6	SD	3	3	
Jumlah		47	33	14

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Comal berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 13 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 27 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SD sebanyak 3 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Comal masih perlu ditingkatkan karena pegawai di Kecamatan Comal, dominan berpendidikan SLTA sebanyak 57, 44 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1	1	
3	IVA	5	3	2
4	IVB	5	5	
Jumlah		12	10	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal., 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Comal berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 5 orang, Eselon IVB sebanyak 5 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Comal berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVA dan IVB yaitu masing – masing sebanyak 41,67 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Comal telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2020

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran		Uraian Permasalahan
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD							
	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	23.275.000	11.275.000	23.275.000	11.275.000	100 %	100%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran							
	Kegiatan Koordinasi Kecamatan, desa dan kelurahan	88.600.000	63.400.000	88.600.000	63.400.000	100%	100%	
	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	14.280.000		14.280.000		100%		
3.	Program Pengembangan Kewilayahan							

	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat desa/kelurahan		30.794.000		30.794.000		100%	
	Kegiatan Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa		12.680.000		12.680.000		100%	

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Comal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Inventaris Aset Kecamatan Comal

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah	72	72			9.987.486.872
		01	Tanah					
			Jumlah KIB A					
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	1		1		4.500.000
		03	Alat-alat Angkutan	13	12	1		570.126.828
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	339	319		20	713.29.700
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	23	23			71.321.571
		08	Alat-alat Kedokteran	9	9			14.790.000
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B					
3	03		Gedung dan Bangunan	16	16			5.843.44.500
		11	Bangunan Gedung					
		12	Monumen					

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah KIB C					
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan	7	7			244.69.100
		14	Bangunan Air/Irigasi	4	4			143.676.500
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	3	3			3.500.000
			Jumlah KIB D					
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	89	80	9		17.442.500
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	20	10	10		16.802.500
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total	596	555	21	20	17.211.151.971

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal., 2021

Berdasarkan tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Comal sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 18 desa/kelurahan di Kecamatan Comaldengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Comal

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Tumbal	4	4	18	11	16	
2	Pecangakan	4	6	35	12	30	
3	Purwosari	7	21	50	14	42	
4	Purwoharjo		9	62		44	
5	Sikayu	4	4	14	13	14	
6	Sidorejo	2	6	30	14	36	
7	Lowa	2	4	9	10	8	
8	Ambokulon	3	3	7	11	10	
9	Gedeg	3	3	9	11	12	
10	Gandu	3	5	15	11	16	
11	Gintung	3	3	17	11	12	
12	Sarwodadi	6	6	33	14	20	
13	Susukan	6	6	26	15	22	
14	Klegen	3	3	17	12	10	
15	Wonokromo	3	6	22	11	18	
16	Kebojongan	3	3	24	11	22	
17	Kandang	2	4	23	10	18	
18	Kauman	2	5	27	12	28	
Jumlah		60	101	439	206	378	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2021

Kecamatan Comal terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan, 439 RT dan 101 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 378 personil Linmas.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Comal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LKJIP	Nilai				C	C	CC	CC	CC	C	C	CC	CC	C	C	CC	CC	CC	CC
2	Persentase penyerapan anggaran	%				100	100	100	100	96	100	100	99,33	99,50	99,47	100	100	100	100	96
3	Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%				20	40	60	80	84	20	40	60	70	84	100	100	100	100	100
5	Nilai SKM	Skor				Na	Na	78	78	78	Na	Na	78	78	78	Na	Na	100	100	100
6	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Comal, 2021

Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Comal selama tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Melebihi target

Tidak ada rasio capaian yang melebihi target pada tahun 2016 – 2020 di Kecamatan Comal

2. Memenuhi target, meliputi :

- Nilai LKJIP (2016 – 2019)
- Persentase penyerapan anggaran (2016 – 2020)
- Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa (2016 – 2020)
- Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2016 – 2020)
- Nilai SKM (2018 – 2020)
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan (2016 – 2020)
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016 – 2020);
- Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia (2016 – 2020)
- Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD (2016 – 2020)
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016 – 2020)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, yaitu pada Nilai LKJIP (2020), yang disebabkan oleh : (1) Masih terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja; (2) Dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja belum dipublikasikan kedalam website resmi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang; dan (3) Antara Perjanjian Kinerja dengan dokumen Renstra masih ada yang belum sinkron.

Tabel 2.8. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Tahun 2020 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase capaian PBB	%	55,26	68,53	71,32	75,72	65,62
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	63,33	63,33	53,33	53,33	23,33
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	93,75	100	100	100	100
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	%	83,33	83,33	83,33	83,33	50
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
7	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	65	65	70	75	90
8	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	62,50	75	100	95	100
9	Jumlah potensi konflik	kasus	0	1	0	0	0
10	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	70,59	76,47	82,35	88,23	52,94
11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	0	0	0	0	30,11
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	0	0	0	0	31,05

Sumber : Kecamatan Comal, 2021

Persentase capaian PBB Kecamatan Comal selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat yaitu sebesar 55,26% pada tahun 2016 menjadi sebesar 65,62% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar PBB.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertanganiselama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, yaitu sebesar 63,33% pada tahun 2016 menjadi sebesar 23,33% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari

kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 93,75% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, yaitu sebesar 83,33% pada tahun 2016 menjadi sebesar 50% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membuat pembinaan menjadi kurang optimal.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung stagnan, yaitu sebesar 100 dari tahun 2016 - 2020. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 65% pada tahun 2016 menjadi sebesar 90% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya dana kelurahan yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari PD terkait.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 62,50% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2017 masih terdapat potensi konflik. Potensi konflik ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, yaitu sebesar 70,59% pada tahun 2016 menjadi sebesar 52,94% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Comal Tahun 2016-2020 dan pada RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026

terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Comal tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan SDGs, Indikator pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Indikator pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Comal, 2021

Tabel 2.8. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Comal, 2021

Tabel 2.8. e
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Comal, 2021

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	113.955	160.150	235.060	299.050	362.640	111.507	156.081	234.587	295.227	362.375	97,8518	97,4593	99,7988	98,7216	99,9269	33,95	34,72
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	304.275	134.735	874.850	430.700	379.200	303.919	134.735	869.975	430.239	379.090	99,883	100	99,4428	99,893	99,971	107,72	106,90
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.900	11.003	11.870	13.970	5.770	11.900	10.203	11.870	13.970	5.770	100	92,7293	100	100	100	-10,17	-9,73
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	36.460	45.315	65.856	81.485	63.335	36.460	45.315	65.856	81.485	63.335	100	100	100	100	100	17,77	17,77
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	73.380					73.380					100					-25,00	-25,00
Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah																	
Program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	5.111					5.111					100						-25,00
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran		837.092	1.039.933	1.084.607	769.923		834.409	1.037.071	1.077.845	735.895		99,6795	99,7248	99,3765	95,5803	-0,12	-0,88
Program pengembangan kewilayahan				1.327.403	60.474				1.322.252	60.474			99,6119	100		-23,86	-23,86
Jumlah	545.081	1.188.295	2.227.569	3.237.215	1.641.342	542.277	1.180.743	2.219.359	3.221.018	1.606.939							
Rata - Rata											99,62	97,97	99,79	99,60	99,25	12,54	8,32

Sumber : Kecamatan Comal, 2021

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Comal cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 99,62% pada tahun 2016 menjadi sebesar 99,25% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Comal. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Comal selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,54%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,32%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Comal

Kecamatan Comal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Comal tahun 2021-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
COMAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Comal

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Comal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Comal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Comal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
			Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
Masih terdapat pengajuan surat non perizinan			
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan
			Masih rendahnya sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
	Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin		
	Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	
		Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	
		Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	
Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin			
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan ketahanan nasional	Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
6	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) Masih rendahnya kapasitas SDM	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD Belum optimalnya penyusunan dokumen penatausahaan BMD Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas Minimnya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang perlu diganti
			Belum tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
			Belum tercukupinya peralatan rumah tangga yang diperlukan
			Belum tercukupinya bahan logistik kantor
			Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan
			Minimnya bahan bacaan yang tersedia
			Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan
			Penataan arsip belum sesuai ketentuan
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan motor dinas
			Belum tercukupinya kebutuhan mebel
			Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
			Belum tercukupinya kebutuhan sarpras gedung kantor
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat
			Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Terdapat kebutuhan terhadap jasa peralatan dan perlengkapan kantor
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

- a. Belum optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 87,30%.

Adapun pelayanan publik yang dilaksanakan meliputi penyediaan data dan informasi pemerintahan, pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan pelayanan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan. Pada tahun 2020, masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sebesar 94,69%.
- c. Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, dari seluruh gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di tingkat desa dan kecamatan, masih ada sebesar 0,86% gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak dapat ditangani.
- d. Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan. Pada tahun 2020, masih terdapat 14 potensi konflik namun potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa. Sampai dengan tahun 2020 persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan desa baik hanya sebesar 52,94%.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Comal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;

4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Comal mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Comal sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Comal tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Comal, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan transtibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, ramah dan nyaman 9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 10. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	<p>pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> <p>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p> <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p>	<p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p> <p>6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	<p>desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>11. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>12. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>13. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran</p> <p>14. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan</p>	<p>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p> <p>6. Adanya pendampingan dari PD terkait</p> <p>7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>
Desa (Dewi) Desa (Desi) Desa (Dedi)	<p>Wisata</p> <p>Sinergi</p> <p>Digital</p> <p>Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p>	<p>Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p>	<p>Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p>	<p>Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Comal. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Comal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Comal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Comal dengan Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang sesuai

dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang menjadi paduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu : (1) meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran berupa Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta indeks kinerja ormas; (2) meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks ketahanan nasional gatra ideologi, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, dan Indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya; (3) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; (5) meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran berupa persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun, tingkat kapabilitas auditor Kemendagri, tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, dan Indeks kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni; (6) meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah; (7) meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dengan indikator sasaran berupa Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah, persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama,

Indeks pengawasan pemerintahan daerah, dan Indeks kapasitas Inspektorat Kabupaten; (8) terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik; (9) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; (10) meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa IRB; (11) terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator sasaran berupa Indeks pengawasan internal dan Indeks penanganan pemeriksaan khusus; dan (12) meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, meliputi : (1) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; dan (3) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum; (2) meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan kebakarandengan indikator cakupan pelayanan kebakaran.

Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani; dan (3) meningkatnya pelayanan kinerja Bakesbangpol dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Bakesbangpol.

Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, meliputi : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; dan (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes; dan (2) meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, yaitu meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Renstra Kemendagri/PD (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Indeks kewaspadaan nasional 2. Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik 3. Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

	kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	<p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahannya</p>	<p>terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahannya</p>	<p>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>
Renstra Satpol PP				
Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	<p>1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>2. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup</p>	<p>Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>	<p>Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>	<p>Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>

Renstra Bakesbangpol				
1. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 2. Persentase potensi konflik agama yang tertangani	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
Renstra Dinpermasdes				
Jumlah desa berdaya	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik

Kabupaten Pematang Jaya. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Comal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD

yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Comal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Comal, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pematang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Comal yaitu **“Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pematang”**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Comal

Kecamatan Comal dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Comal harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Comal secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal selama tahun 2021–2026 adalah **“Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Comal sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Comal selama tahun 2021-2026, adalah **“Meningkatnya pelayanan kecamatan”**. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase

pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Comal dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Comal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78	80,70	83	85	90	92	95	95
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	85,48	87,11	88,22	89,33	90,44	91,55	92,67	92,67

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Comal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Comal dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas 2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP 3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah 5. Meningkatkan penanganan potensi konflik 6. Meningkatkan pembinaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan 2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat 3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin 5.1. Penyelenggaraan berbagai

		<p>pengawasan pemerintahan desa</p>	<p>kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa</p> <p>5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam</p> <p>6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset</p> <p>6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD</p>
--	--	-------------------------------------	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Comalyang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Comal selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Comal
Kabupaten Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
																						Kecamatan Comal + Kelurahan	Kecamatan Comal + Kelurahan
																						Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
Meningkatkan pelayanan Kecamatan yang prima				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78	80,70		83		85		90		92		95		95			Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
Meningkatnya pelayanan kecamatan				Cakupan layanan kecamatan	%	85,48	87,11		88,22		89,33		90,44		91,55		92,67		92,67			Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Sakip	Nilai	30,11	33	5.026.834.600	35	5.020.808.985	37	5.026.834.600	40	4.941.834.600	42	5.026.834.600	45	5.026.834.600	45	30.069.981.985	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
				IRB	Nilai	31,05	33		35		37		40		42		45		45			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.980.400		31.980.400		39.029.420		39.029.420		39.029.420		39.029.420		225.078.480	Kecamatan comal	Kecamatan comal	
			Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen		13		13		13		13		13		13		69		Kecamatan comal	Kecamatan comal
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan comal	Kecamatan comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen		3	4.384.400	3	4.384.400	3	4.803.620	3	4.803.620	3	4.803.620	3	4.803.620	18	27.983.280	Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen		1	3.088.900	1	3.088.900	1	3.243.345	1	3.243.345	1	3.243.345	1	3.243.345	6	19.151.180	Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen		1	2.655.400	1	2.655.400	1	2.788.170	1	2.788.170	1	2.788.170	1	2.788.170	6	16.463.480	Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dokumen		1	3.262.000	1	3.262.000	1	3.425.100	1	3.425.100	1	3.425.100	1	3.425.100	6	20.224.400	Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen		1	3.044.800	1	3.044.800	1	3.197.040	1	3.197.040	1	3.197.040	1	3.197.040	6	18.877.760	Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen		3	5.483.500	3	5.483.500	3	5.757.675	3	5.757.675	3	5.757.675	3	5.757.675	18	33.997.700	Kecamatan comal	Kecamatan comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen		3	15.061.400	3	10.061.400	3	15.814.470	3	15.814.470	3	15.814.470	3	15.814.470	18	88.380.682	Kecamatan comal	Kecamatan comal	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.152.221.500		4.148.305.975		4.148.305.975		4.148.305.975		4.148.305.975		4.148.305.975		24.893.751.375	Kecamatan comal	Kecamatan comal	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		3		3		3		3		3		3		18		Kecamatan comal	Kecamatan comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%		100		100		100		100		100		100		100			Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang/bulan		33	4.143.907.000	33	4.143.907.000	33	4.143.907.000	33	4.143.907.000	33	4.143.907.000	33	4.143.907.000	198	24.863.442.000	Kecamatan comal	Kecamatan comal	
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokumen		3	8.314.500	3	4.398.975	3	4.398.975	3	4.398.975	3	4.398.975	3	4.398.975	18	30.309.375	Kecamatan comal	Kecamatan comal	
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah							4.125.000		4.431.250		4.431.250		4.431.250		4.431.250		26.281.250	Kecamatan comal	Kecamatan comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	Dokumen		4		4		4		4		4		4		4		Kecamatan comal	Kecamatan comal
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	%		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah (RKBUD) SKPD yang tersusun	Dokumen		2		2	2.125.000	2	2.331.250	2	2.331.250	2	2.331.250	2	2.331.250	12	13.781.250	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen		2		2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.100.000	12	12.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							68.155.000		69.489.240		78.489.240		78.489.240		78.489.240		373.111.960	Kecamatan Comal	Kecamatan comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Orang		5		5		5		5		5		5		5		Kecamatan comal	Kecamatan comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkatkan kapasitasnya	%		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan comal	Kecamatan comal
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang/kegiatan		5		5	5.000.000	5	15.500.000	5	15.500.000	5	15.500.000	5	15.500.000	30	67.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Orang/kegiatan		5		5	2.245.500	5	12.357.670	5	12.357.670	5	12.357.670	5	12.357.670	30	51.676.180	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							213.782.200		229.337.200		238.851.310		238.851.310		238.851.310		1.398.524.640	Kecamatan Comal	Kecamatan comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (layanan)	Layanan		1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan comal	Kecamatan comal
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan comal	Kecamatan comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				yang memerlukan pelaksanaan tugas (%)																			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan		13	8.036.800	13	8.036.800	13	8.438.640	13	8.438.640	13	8.438.640	13	8.438.640	78	49.828.160	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	unit		1		1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	6	27.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan		1		1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	6	27.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan		23	162.245.400	23	162.245.400	23	170.357.670	23	170.357.670	23	170.357.670	23	170.357.670	138	1.005.921.480	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan		3	9.000.000	3	9.450.000	3	9.450.000	3	9.450.000	3	9.450.000	3	9.450.000	18	56.250.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar)	lembar		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	108.000		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia (buku)	buku		2	4.500.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	12	28.125.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
				Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan		2		2		2		2		2		2		12		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (kegiatan)	kegiatan		50	30.000.000	50	31.500.000	50	31.500.000	50	31.500.000	50	31.500.000	50	31.500.000	300	187.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	jenis		1		1	3.380.000	1	3.380.000	1	3.380.000	1	3.380.000	1	3.380.000	6	16.900.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100.739.110		71.347.475		71.347.475		71.347.475		103.697.975		418.475.510	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		23		23		23		23		23		23		23		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit		2		2	64.701.000	1		1		1		1	32.350.500	8	97.051.500	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit		14		12	12.245.000	12	30.404.975	12	30.404.975	12	30.404.975	12	30.404.975	72	133.866.900	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit		9		9	18.793.110	9	30.500.000	9	30.500.000	9	30.500.000	9	30.500.000	54	210.614.610	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang tersedia	unit		1		1	5.000.000	1	10.442.500	1	10.442.500	1	10.442.500	1	10.442.500	6	57.212.500	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122.600.000		126.170.000			132.300.000			132.300.000			132.300.000			777.970.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa		1		1		1		1		1		1		1			1	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%																		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat		650	7.500.000	650	7.500.000	650	7.875.000	650	7.875.000	650	7.875.000	650	7.875.000	650	7.875.000	650	46.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/bulan		2	27.600.000	2	27.600.000	2	28.980.000	2	28.980.000	2	28.980.000	2	28.980.000	12	171.120.000			Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis/bulan		4		4	3.570.000	4	3.570.000	4	3.570.000	4	3.570.000	4	3.570.000	24	17850.000			Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/bulan		12	87.500.000	12	87.500.000	12	91.875.000	12	91.875.000	12	91.875.000	12	91.875.000	72	542.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				311.428.000		372.905.900		364.711.500		279.711.500		364.711.500		332.361.000		2.025.829.400	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		37		37		37		37		37		37		37		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memerlukan pelaksanaan tugas	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit		10	54.500.000	10	54.500.000	10	57.225.000	10	57.225.000	10	57.225.000	10	57.225.000	60	337.900.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perang kat daerah penang gung jawab	Loka si
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Ta rge t	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit		14		14	3.380.000	14	9.380.000	14	9.380.000	14	9.380.000	14	9.380.000	84	40.900.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit		23	23.570.000	23	20.000.000	23	24.748.500	23	24.748.500	23	24.748.500	23	24.748.500	138	142.564.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit		1	233.358.000	1	245.025.900	1	233.358.000	1	148.358.000	1	233.358.000	1	201.007.500	6	1.294.465.400	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit		1	79.380.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	145.380.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	61,67	63,33	68.155.000	65	69.489.240	66,67	78.489.240	68,33	78.489.240	70	78.489.240	71,67	78.489.240	71,67	451.601.200	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.000.000		9.334.240		9.334.240		9.334.240		9.334.240		9.334.240		55.671.200	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Keluaran Kegiatan	jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data		1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia (data)	data		1	9.000.000	1	9.334.240	1	9.334.240	1	9.334.240	1	9.334.240	1	9.334.240	6	55.671.200	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					5.055.000		15.055.000				15.055.000				15.055.000			80.330.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		25		25		25		25		25		25		25		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	peraturan		1		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	6	25.00.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan		25		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	6	25.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani (kasus)	kasus		5	5.055.000	5	5.055.000	5	5.055.000	5	5.055.000	5	5.055.000	5	5.055.000	25	30.330.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					54.100.000		45.100.000		54.100.000		54.100.000		54.100.000		54.100.000		315.600.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan		2		2		2		2		2		2		2		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	izin		100	29.000.000	100	25.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	600	170.000.000	Kecamatan Comal	
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	dokumen		17	25.100.000	17	20.100.000	17	25.100.000	17	25.100.000	17	25.100.000	17	25.100.000	102	145.600.000	Kecamatan Comal	
				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat		25		25		25		25		25		25		150		Kecamatan Comal	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	1.099.090.700	100	1.108.424.075	100	1.108.424.075	100	1.108.424.075	100	1.108.424.075	100	1.108.424.075	100	6.641.211.084	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					77.447.500		80.029.875		80.029.875		80.029.875		80.029.875		80.029.875		477.596.875	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	Orang		107		107		107		107		107		107		107			Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	%																	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang desa/kelurahan	orang		50	11.247.500	50	11.247.500	50	11.809.875	50	11.809.875	50	11.809.875	50	11.809.875	300	69.734.500	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	orang		50	40.400.000	50	42.420.000	50	42.420.000	50	42.420.000	50	42.420.000	50	42.420.000	300	252.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Kerja Kecamatan																				
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	Desa/ke-lurahan		7	25.800.000	7	25.800.000	7	25.800.000	7	25.800.000	7	25.800.000	7	25.800.000	42	154.800.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					35.020.000		41.771.000	1	41.771.000		41.771.000		41.771.000		41.771.000		243.875.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	Lembaga		1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	lembaga		1	35.020.000	1	36.771.000	1	36.771.000	1	36.771.000	1	36.771.000	1	36.771.000	6	218.875.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	orang		25		25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	150	25.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (%)	%	100	100		100	12.059.200	100	12.059.200	100	12.059.200	100	12.059.200	100	12.059.200	100	72.355.200	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30		30	6.881.200	30	6.881.200	30	6.881.200	30	6.881.200	30	6.881.200	30	41.287.200	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	Orang																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang				5	6.881.200	5	6.881.200	5	6.881.200	5	6.881.200	5	6.881.200	25	41.287.200	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6.881.200		6.881.200		6.881.200		6.881.200		6.881.200		41.287.200		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal		
			Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan		2		5		5		5		5		5		5		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	peraturan		2		2	5.178.000	2	5.178.000	2	5.178.000	2	5.178.000	2	5.178.000	10	25.890.000	Kecamatan Comal		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Republik Indonesia																				
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	92.331.500	100	107.509.000	100	107.509.000	100	107.509.000	100	107.509.000	100	107.509.000	100	629.876.500	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					92.331.500		107.509.000			107.509.000			107.509.000			107.509.000		629.876.500	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang		6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi	dokumen		2	59.831.500	2	70.009.000	2	70.009.000	2	70.009.000	2	70.009.000	2	70.009.000	12	409.876.500	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun																		
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang		25		25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	150	25.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	kasus		6		6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	36	12.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur Forkompincam yg berkoordinasi (unsur/kegiatan)	Unsur/Kegiatan		10	32.500.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	182.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	52,63	61,11	278.661.200	66,67	256.780.000	72,22	283.661.200	77,78	368.661.200	83,33	283.661.200	88,89	283.661.200	88,89	1.755.086.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				278.661.200		256.780.000		283.661.200		368.661.200		283.661.200		283.661.200		1.755.086.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal		
			Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa		17		17		17		17		17		17		17		Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	
			Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%																Kecamatan Comal	Kecamatan Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perang kat daerah penang gung jawab	Loka si
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Ta rge t	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Ta rge t	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	Des a/ke giat an		17	35.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	102	210.600.000	Kecamata n Comal	Kecam atan Comal
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Des a/ke giat an		17	35.000.000	17	35.000.000	17	35.000.000	17	35.000.000	17	35.000.000	17	35.000.000	102	210.000.000	Kecamata n Comal	Kecam atan Comal
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Des a/ke giat an		17	40.000.000	17	35.000.000	17	40.000.000	17	40.000.000	17	40.000.000	17	40.000.000	102	235.000.000	Kecamata n Comal	Kecam atan Comal
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ora ng/kegi atan		17	25.000.000	17	25.000.000	17	25.000.000	17	25.000.000	17	25.000.000	17	25.000.000	102	150.000.000	Kecamata n Comal	Kecam atan Comal
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	des a		17		17		17		17	85.000.000	17		17		102	85.000.000	Kecamata n Comal	Kecam atan Comal
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Ora ng/kegi atan		17	21.580.000	17	21.580.000	17	21.580.000	17	21.580.000	17	21.580.000	17	21.580.000	102	129.480.000	Kecamata n Comal	Kecam atan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat		5		5	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	14	25.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa/kegiatan		17	35.100.000	17	30.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	17	35.100.000	102	210.600.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan linmas	orang		54	30.000.000	54	3.000.000	54	26.250.000	54	26.250.000	54	26.250.000	54	26.250.000	324	43.500.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa/kegiatan		17	30.000.000	17	25.000.000	17	30.000.000	17	30.000.000	17	30.000.000	17	30.000.000	102	175.000.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	Orang/kegiatan		17	26.881.200	17	20.000.000	17	26.881.200	17	26.881.200	17	26.881.200	17	26.881.200	102	154.406.000	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			KELURAHAN PURWO HARJO																				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		1	2.325.000	1	2.325.000	1	2.441.250	1	2.441.250	1	2.441.250	1	2.441.250	6	14.415.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		3	117.518.600	3	64.492.400	3	123.394.530	3	123.394.530	3	123.394.530	3	123.394.530	18	675.589.120	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis / Bulan		3	7.042.400	3	3.000.000	3	7.394.520	3	7.394.520	3	7.394.520	3	7.394.520	18	39.620.480	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lebaran		10,088		10,088												Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000	6	18.600.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
				Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	Buku		1		1		1		1		1		1		6			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	kegiatan		48	3.650.000	48	3.650.000	48	3.832.500	48	3.832.500	48	3.832.500	48	3.832.500	288	22.630.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit		1	7.287.500	1	7.287.500	1	7.287.500	1	7.287.500	1	7.287.500	1	7.287.500	6	43.725.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%																	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat		180	1.350.000	180	1.350.000	180	1.417,500	180	1.417,500	180	1.417,500	180	1.417,500	1.080	8.370.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/Bulan		2	15.600.000	2	15.000.000	2	16.380.000	2	16.380.000	2	16.380.000	2	16.380.000	12	96.120.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/Bulan		17	90.000.000	17	90.000.000	17	94.500.000	17	94.500.000	17	94.500.000	17	94.500.000	102	558.000.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit																Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan (kegiatan)	kegiatan		110	986.623.200	110	986.623.200	110	986.623.200	110	986.623.200	110	986.623.200	110	986.623.200	130	5.919.739.200	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan																Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%																Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan	orang		80	12.948.200	80	12.948.200	80	12.948.200	80	12.948.200	80	12.948.200	80	12.948.200	480	77.689.200	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	unit		8	732.533.500	8	732.533.500	8	732.533.500	8	732.533.500	8	732.533.500	8	732.533.500	48	4.395.201.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang/kegiatan		50	241.141.500	50	241.141.500	50	241.141.500	50	241.141.500	50	241.141.500	50	241.141.500	300	1.446.849.000	Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah laporan pelaksanaan verwal DTKS	dokumen		1		1		1		1		1		1		6		Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	lembaga		1		1		1		1		1		1		6		Kelurahan Purwoharjo	Kelurahan Purwoharjo	

Kecamatan Comal sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Comal tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 6.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Comal telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.6
RAD SDM Kecamatan Comal Tahun 2021-2026

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Targ et	Anggaran (Rp)	Pese rta	Ta rg et	Anggaran (Rp)	Peserta	Ta rg et	Anggaran (Rp)	Peserta	Targ et	Anggaran (Rp)	Pese rta	Targ et	Anggaran (Rp)	Peserta	Targ et	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program pembinaan dan pengawasa n pemerinta han desa																				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa																				
	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	17	25.000.000	Perangka t Desa	17	3.000.000	Perangka t Desa	17	36.750.000	Perangka t Desa	17	36.750.000	Perangka t Desa	17		Perangka t Desa	17		Perangka t Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	orang	54	30.000.000	Anggota linmas Desa/Kel	54	3.000.000	Anggota linmas Desa/Kel	54	26,250,000	Anggota linmas Desa/Kel	54	26,250,000	Anggota linmas Desa/Kel	54	26,250,000	Anggota linmas Desa/Kel	54	26,250,000	Anggota linmas Desa/Kel
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dan Perangkat	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan	orang	17	25.000.000	Perangka t Desa	17	3.000.000	Perangka t Desa	17	26,250,000	Perangka t Desa	17	26,250,000	Perangka t Desa	17	26,250,000	Perangka t Desa	17	26,250,000	Perangka t Desa

	Desa	Perangkat Desa																			
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang	17	21.580.000	Anggota BPD	17	3.000.000	Anggota BPD	17	20.000.000	Anggota BPD									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang				25	3.000.000	Toma/pemuda	25	5,250.000	Toma/pemuda									

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Comal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Comal yang

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Comal Kabupaten Pematang
 Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Comal	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78	80,70	83	85	90	92	95	95
2	Cakupan layanan kecamatan (%)	%	85,48	87,11	88,22	89,33	90,44	91,55	92,67	92,67

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan Comal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KECAMATAN COMAL											
A	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78	80,70	83	85	90	92	95	95	Kepala
		Cakupan layanan kecamatan (%)	%	85,48	87,11	88,22	89,33	90,44	91,55	92,67	92,67	
I.	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	31,05	33	35	37	40	42	45	45	Sekretaris
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	30,11	33	35	37	40	42	45	45	Sekretaris
a.	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Dokumen	13	13	13	13	13	13	13	48	Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Secam
1.	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Binprokeu
2.	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Binprokeu
3.	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Binprokeu
4.	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Binprokeu
5.	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Binprokeu

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	DPA-SKPD											
6.	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Binprokeu
7.	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Binprokeu
b.	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Dokumen	33	33	33	33	33	33	33	198	
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang/bulan	33	33	33	33	33	33	33	198	Kasubag Binprokeu

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(orang/bulan)										
2.	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Binprokeu
c.	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	24	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun (dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasubag Umpeg
2.	7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasubag Umpeg

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SKPD	SKPD yang tersusun(dokumen)										
d.	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (orang)	Orang	5	5	5	5	5	5	5	30	
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang/kegiatan)	Orang/kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	30	Kasubag Umpeg
2.	7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang/kegiatan)	Orang/kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	30	Kasubag Umpeg
e.	7.01.01.2.06 Administrasi Umum											Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perangkat Daerah											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (layanan)	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekcam
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
1.	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan	13	13	13	13	13	13	13	78	Kasubag Umpeg
2.	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umpeg
3.	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umpeg

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan	23	23	23	23	23	23	23	136	Kasubag Umpeg
5.	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan	3	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Umpeg
		Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar)	lembar	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	Kasubag Umpeg
6.	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia (buku)	Buku	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasubag Umpeg
		Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/bulan	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasubag Umpeg
7.	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (kegiatan)	kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	300	Kasubag Umpeg
8.	7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata (jenis)	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umpeg
f.	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	23	23	23	23	23	23	23	136	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasubag Umpeg
2.	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	14	12	12	12	12	12	12	72	Kasubag Umpeg
3.	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	9	9	9	9	9	9	9	54	Kasubag Umpeg
4.	7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia		1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umpeg
g.	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekcam
	Hasil Kegiatan	Persentase	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas										
1.	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	650	650	650	650	650	650	650	3900	Kasubag Umpeg
2.	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/bulan	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasubag Umpeg
3.	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis/bulan	4	4	4	4	4	4	4	24	Kasubag Umpeg
4.	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	orang/bulan	12	12	12	12	12	12	12	72	Kasubag Umpeg
h.	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	37	37	37	37	37	37	37	122	Sekcam
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas										
1.	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	10	10	10	10	10	10	10	60	Kasubag Umpeg
2.	7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	14	14	14	14	14	14	14	84	Kasubag Umpeg
3.	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	23	23	23	23	23	23	23	136	Kasubag Umpeg
4.	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umpeg
5.	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umpeg
II	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase pelayanan publik yang tersedia (%)	%	61,67	63,33	65	66,67	68,33	70	71,67	71,67	Camat

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelayanan Publik											
a.	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekcam
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%									Sekcam
1.	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia (data)	Data	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasi Pemerintahan
b.	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	25	25	25	25	25	25	25	150	
	Hasil Kegiatan	Persentase	%									

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pengaduan masyarakat yang terselesaikan										
1.	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	Peraturan	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasi Pelayanan
2.	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan	3	3	3	3	3	3	3	18	Kasi Pelayanan
3.	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	kasus	5	5	5	5	5	5	5	30	Kasi Trantib
c.	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan	2	2	2	2	2	2	2	12	
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia										
1.	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	100	100	100	100	100	100	100	100	Kasi Pelayanan
2.	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	dokumen	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Pelayanan
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	Surat	25	25	25	25	25	25	25	150	
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
a.	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa	Orang	107	107	107	107	107	107	107	642	

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		/ Kel + Kec)										
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
											100	
1.	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan	orang	50	50	50	50	50	50	50	300	Kasi PMD
2.	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan (orang)	orang	50	50	50	50	50	50	50	300	Kasi PMD
3.	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	Desa/kelurahan	7	7	7	7	7	7	7	42	Kasi PMD
c.	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan											Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Kecamatan											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	6	
	Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	lembaga	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasi PMD
2.	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	orang	25	25	25	25	25	25	25	150	Kasi PMD
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Camat
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Sekcam

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	5	5	5	5	5	5	5	30	Kasi Trantib
b.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan	2	2	2	2	2	2	2	12	

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	Peraturan	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasi Trantib
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Camat
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan	Orang	6	6	6	6	6	6	6	36	

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	nasional Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%									
1.	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasi Trantib
2.	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	25	25	25	25	25	25	25	150	Kasi Trantib
3.	7.01.05.2.01.05	Jumlah potensi	kasus	6	6	6	6	6	6	6	36	Kasi

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	konflik sosial tingkat desa dan kecamatan										Trantib
4.	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	Tema	10	10	10	10	10	10	10	60	Kasi Pemerintahan
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (%)	%	52,63	61,11	66,67	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89	Camat
a.	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	17	17	17	17	17	17	17	102	
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%									
1.	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa/kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Pemerintah

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	penyusunan Perdes dan Perkades										ahan
2.	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa/kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Pemerintahan
3.	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa/kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi PMD
4.	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang/kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Pemerintahan
5.	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Pemerintahan
6.	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan	Orang/kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	30	Kasi Pemerintahan

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Permusyawaratan Desa										
7.	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Pemerintahan
8.	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa/kegiatan	54	54	54	54	54	54	54	324	Kasi Pemerintahan
9.	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan linmas	orang	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi Trantib
10.	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (desa/kegiatan)	Desa/kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi PMD
11.	7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan	Orang/kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	102	Kasi PMD

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	pemberdayaan desa										
B.	KELURAHAN PURWOHARJO											
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek									Sekretaris
a.	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan									
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%									
1.	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis / Bulan		1	1	1	1	1	1	6	SEKLUR
2.	7.01.01.2.06.04	Jenis bahan logistik	Jenis /		3	3	3	3	3	3	18	SEKLUR

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Bulan									
3.	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis / Bulan		3	3	3	3	3	3	18	SEKLUR
		Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar)	Lembar		10.088	10.088	10.088	10.088	10.088	10.088	60.528	SEKLUR
4.	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	Jenis/Bulan		1	1	1	1	1	1	6	SEKLUR
5.	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Kegiatan		48	48	48	48	48	48	288	SEKLUR
b.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit									
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	%									
1.	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Unit		1	1	1	1	1	1	6	SEKLUR

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah aktivitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Aktivitas									
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%									
1.	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/ Bulan		2	2	2	2	2	2	12	SEKLUR
2.	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/ Bulan		2	2	2	2	2	2	12	SEKLUR
3.	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		17	17	17	17	17	17	102	SEKLUR
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang	Unit									

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		terpelihara										
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%									
1.	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit		4	4	4	4	4	4	24	SEKLUR
2.	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		4	4	4	4	4	4	24	SEKLUR
3.	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara	Unit		1	1	1	1	1	1	6	SEKLUR
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	110	110	110	110	110	110	110	110	

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%									
1.	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan	orang	80	80	80	80	80	80	80	80	kasi ekbang
2.	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	kasi ekbang
3.	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang/kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	300	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem
		Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	lembaga	1	1	1	1	1	1	1	6	

BAB VIII

PENUTUP

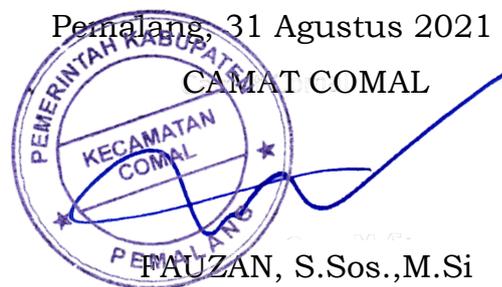
Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Comal ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Comal. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Comal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Comal merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Comal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Comal yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Comal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Comal. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Comal di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Comal ini.

Pemalang, 31 Agustus 2021



CAMAT COMAL

FAUZAN, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19720420 199303 1 004